

**LAPORAN TAHUNAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK WONOGIRI (Pesero)**  
**TAHUN 2019**

**PENDAHULUAN**

Laporan Tata Kelola PT BPR BKK WONOGIRI (Pesero) ini disusun untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang merujuk Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, penerapan tata kelola pada PT BPR BKK WONOGIRI (Pesero) menerapkan prinsip-prinsip TARIF sebagaimana telah kami ungkapkan pada laporan tahun-tahun sebelumnya.

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola ini meliputi:

1. Pengungkapan penerapan Tata Kelola.
2. Kepemilikan saham Direksi.
3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
4. Kepemilikan saham Dewan Komisaris.
5. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.
6. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
7. Rasio gaji tertinggi dan terendah.
8. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
9. Jumlah penyimpangan intern (internal fraud).
10. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaiannya.
11. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan.

Penjabaran dari penerapan tata kelola perusahaan sebagaimana tersaji dalam Laporan Tahunan Penerapan Tata Kelola berikut ini.

## LAPORAN TAHUNAN PENERAPAN TATA KELOLA

### 1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

##### i. Jumlah dan komposisi anggota Direksi :

Jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang yaitu :

NO	NAMA	JABATAN
1	SUCIPTO, SE	DIREKTUR UTAMA
2	SARTI, SE.MM	DIREKTUR UMUM DAN KEPATUHAN
3	SUWARTO, SE	DIREKTUR PEMASARAN

- **Sucipto, SE** sebagai Direktur Utama, diangkat berdasarkan RUPS-LB Tanggal 06 Agustus 2018. Telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor KP-01/1446/XI/SU/2018 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-869/KO.031/2018 Tanggal 13 November 2018 untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 06 Agustus 2023.
- **Sarti, SE.MM** diangkat sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan berdasarkan RUPS-LB tanggal 20 September 2017 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor KP-01/1347/X/SU/2017 serta telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-510/KO.0301/2017 tanggal 13 Desember 2017. Telah diangkat kembali berdasarkan RUPS-LB Tanggal 06 Agustus 2018 dan dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor KP-01/1446/XI/SU/2018 serta ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-869/KO.031/2018 Tanggal 13 November 2018 untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 06 Agustus 2023.
- **Suwarto, SE** sebagai Direktur Pemasaran diangkat berdasarkan RUPS LB Tanggal 06 Agustus 2018 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor KP-01/1446/XI/SU/2018 serta telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-869/KO.031/2018 Tanggal 13 November 2018 untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 06 Agustus 2023.

## ii. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris

Direktur Utama dan anggota Direksi yang lain telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik dan secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris. Rekomendasi Dewan Komisaris tertuang dalam Notulen Rapat yang diselenggarakan bersama dengan anggota Direksi. Beberapa hal penting dari Rekomendasi Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Direksi diantaranya adalah sebagai berikut:

- Telah menindaklanjuti Notulen Rapat Tanggal 08 Januari 2019 :
  - a. Persiapan menghadapi MEA tahun 2020.
  - b. Pesan Gubernur, untuk melakukan layanan yang ramah, mudah, murah dan cepat.
  - c. SDM dengan loyalitas tinggi, profesional, efisien, inovatif dan berdedikasi.
  - d. Mempunyai pusat data yang valid dan berintegritas.
- Telah menindaklanjuti Notulen Rapat tanggal 8 Februari 2019 :
  - a. *Lounging* Tabungan “Simpel Ayah Sukses” (Simpanan Pelajar Anak Yatim Mberkahi Sukses) bersamaan dengan pengukuhan TPKAD (Team Percepatan Akses Keuangan Daerah) Kabupaten Wonogiri Oleh Wakil Bupati Wonogiri. *Lounging* Tabungan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Wonogiri.
  - b. Tertib Administrasi, Tertib Keuangan dan Tertib Fisik (Penyimpanan Agunan, Warkat dll).
  - c. Mencermati Kredit Macet dan DPK (Dalam Perhatian Khusus) agar tidak terbengkalai.
- Telah menindaklanjuti Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2019 :
  - a. Menyetujui permohonan pensiun Sdr. Suparmo, SE karena menjabat sebagai Direksi di BPR lain.
  - b. Permohonan penyelenggaraan RUPS untuk pengadaan pegawai kontrak tahun 2019.
- Telah menindaklanjuti Notulen Rapat tanggal 29 Maret 2019:
  - Menyetujui permohonan pensiun Sdr. Didik Darmadi, SE dari status kepegawaian dikarenakan menjadi Direksi di BPR lain.
- Telah menindaklanjuti Notulen Rapat tanggal 16 Mei 2019:
  - a. Melakukan kerjasama dengan pihak Asuransi Askrindo.
  - b. Menyetujui permohonan pensiun Sdr. Bambang Santoso dikarenakan yang bersangkutan ingin mengembangkan usaha.
- Telah menindaklanjuti Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2019 :
  - a. Pengadaan calon pegawai.
  - b. Pembangunan ruang data center TI.
  - c. Pelaksanaan rekreasi.

- d. Pemberian gaji ke 13 (tiga belas).
- Telah menindaklanjuti Notulen Rapat tanggal 9 Juli 2019:
  - a. Pengisian Kasubbid Kepatuhan dan Kasi Pelayanan dengan menggeser Kepala Kantor Kas.
  - b. Pembenahan struktur organisasi.
- Telah menindaklanjuti Notulen Rapat tanggal 16 Agustus 2019:
  - Penanganan kredit bermasalah lebih efektif di dukung oleh organisasi yang efektif dan efisien.
- Telah menindaklanjuti Notulen Rapat tanggal 06 September 2019 :
  - a. Menciptakan persaingan yang sehat sesama BPR milik Pemerintah Daerah.
  - b. Pengembangan terhadap Staf TI dan Staf Legal melalui pelatihan untuk mempersiapkan perubahan Badan Hukum menjadi PT.
  - c. Meningkatkan kerjasama untuk memenuhi target RBB cabang yang belum mencapai target.
- Telah menindaklanjuti Notulen Rapat tanggal 20 November 2019 :
  - Menyetujui pengunduran diri Sdr. Muhamad Hasyim, SE karena mengikuti proses pengisian Direksi di BPR lain.
- Telah menindaklanjuti Notulen Rapat tanggal 10 Desember 2019 :
  - a. Penyesuaian segala sesuatu yang berkaitan dengan beralihnya Badan Hukum dari PD ke PT berpedoman pada ketentuan.
  - b. Meneruskan Konsep Rekrutmen SDM dengan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
  - c. Penggunaan biaya pendidikan untuk mengoptimalkan peningkatan Kualitas SDM.
  - d. Mengoptimalkan Kinerja Capeg.
  - e. Mengoptimalkan fungsi Satuan Kerja Audit Intern dan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko untuk mitigasi risiko yang akan terjadi.

### **iii. Pelaksanaan Operasional**

Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank tahun 2019 dengan baik. Secara umum target tahun 2019 dapat tercapai dimana target Asset tercapai sebesar 105,11 %, Dana Pihak Ketiga tercapai 107,08 %, Kredit Yang Diberikan tercapai 106,75 % pendapatan tercapai 110,68 %, biaya terealisasi sebesar 111,60 % dan laba tercapai sebesar 106,78 %. Disisi lain target NPL sebesar 4,78 % baru terealisasi sebesar 5,30 %. Hal ini mencerminkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi kinerja cukup optimal. Namun masih diperlukan peningkatan kualitas SDM dari sisi spiritual untuk menghindari adanya penyalahgunaan (fraud) oleh oknum pegawai. Pengelolaan biaya cukup

efisien tercermin dari rasio BOPO sebesar 79.78 % dan pengelolaan Likuiditas cukup baik tercermin dari cash ratio sebesar 19,15 % dan LDR sebesar 86,32 %.

**iv. BMPK**

Selama periode laporan tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran BMPK, sebagaimana laporan bulanan BMPK yang telah dikirimkan kepada OJK.

**v. Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko**

Direksi telah menerapkan Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dengan cukup baik yang meliputi adanya kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan laporan-laporan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian pemenuhan Dewan Komisaris Independen belum dapat terlaksana pada tahun 2019 sehingga mengakibatkan penurunan penilaian *self assessment* dari peringkat komposit 1,75 (sangat baik) pada tahun 2018 menjadi 1,84 (baik) pada tahun 2019. Penilaian terhadap Manajemen oleh OJK terdapat penurunan akibat beberapa faktor, terutama pemantauan dan pengendalian terhadap risiko kredit. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan umum OJK di tahun 2019 terdapat kelemahan-kelemahan tata kerja dan pengawasan, yang kemudian dijadikan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaksanaan kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Penerapan Manajemen Risiko yang mengekspose Profil Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan pentahapannya.

**vi. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan**

Direksi telah membuat Laporan Keuangan Tahunan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik “Wartono & Rekan” yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan ditunjuk sebagai pelaksana audit dengan Nomor SPK KP-01/66/XII/PKS/2019 dan 265/WR.01/P.41/SPK/XII/2019. Ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK Nomor 36/SEOJK.03/2017.

Sedangkan laporan Publikasi Triwulan IV posisi laporan bulan Desember 2019 sebagai bagian dari transparansi kondisi keuangan telah dimuat di Surat Kabar Harian Jawa Pos edisi Senin tanggal 30 Maret 2020 di halaman Radar Wonogiri serta telah dipasang di papan pengumuman seluruh kantor baik kantor Pusat maupun Kantor Cabang dan Kantor Kas PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda).

Di dalam operasionalnya PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) tidak terlepas dari masalah hukum. Selama tahun 2019 terdapat 1 (satu)

kasus pengaduan nasabah dari Kantor Cabang Baturetno nomor KC.079/IV/SU/2019 tanggal 04 April 2019 namun sudah terselesaikan dengan baik sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian pengaduan nasabah Nomor KP-01/456 /IV/SU/2019 tanggal 16 April 2019. Sedangkan kasus gugatan pengadilan yang didokumentasikan oleh Direksi pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus yang belum selesai. Pada kasus tersebut PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk dari kantor Advokat CLEMENS AJI DWI WIJAYA, SH and PARTNERS. Kasus tersebut adalah:

- Gugatan yang dilakukan oleh nasabah kredit rekening nomor 01.01.01.002747 dari Kantor Pusat Operasional yang melakukan banding di Pengadilan Tinggi Semarang dengan nomor 284/Pdt/2019/PT SMG saat ini masih dalam proses Pengajuan Lelang.

#### **b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) yaitu :

- 1. Agus Prasutio, SH.MSi** sebagai Ketua Dewan Komisaris, lulus fit and proper test OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK Nomor Kep 30/KO.032/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan diangkat sebagai Ketua Dewan Komisaris berdasarkan RUPS-LB tanggal 21 Mei 2019, dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/691/VI/SU/2019 tanggal 19 Juli 2019 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-699/KO.0301/2019 tanggal 09 Agustus 2019.
- 2. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos, M.Si** sebagai Anggota Dewan Komisaris, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK Nomor KEP-71/KO.0301/2018 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan tanggal 03 September 2018. Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan RUPS-LB tanggal 18 Oktober 2018, dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/1369/X/SU/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-0869/KO.0301/2018 Tanggal 13 November 2018.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaksanaan tugas pengawasan secara aktif yaitu dengan melakukan rapat pengurus yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi yang hasilnya tertuang dalam Notulen Rapat. Sedangkan pengawasan secara pasif yaitu

memantau perkembangan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) melalui sarana komunikasi, teknologi informasi dan media sosial yang ada.

**c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite**

Tahun 2019 PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) belum membentuk komite-komite kerja. Hal ini karena modal inti yang dimiliki belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). Sedangkan Struktur Organisasi PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengalami perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 95/XI/Kep.Dir/2019 dan mulai diberlakukan pada tanggal 02 Desember 2019. Perubahan Struktur Organisasi ini adalah dalam rangka untuk memenuhi ketentuan regulasi dan kebutuhan perusahaan.

**2. Kepemilikan Saham Direksi**

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) merupakan Perusahaan Perseroan Daerah dengan kepemilikan saham sepenuhnya adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham pengendali dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham di PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Demikian pula semua anggota Direksi PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) tidak ada yang memiliki saham di perusahaan lainnya.

Adapun komposisi kepemilikan saham PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) sebagaimana tabel berikut ini :

**1 = Rp 1.000**

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
1. Pemprov Jateng	15.060.000	50,60%
2. Pemkab Wonogiri	14.700.000	49,40%
TOTAL	29.760.000	100 %

**3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR**

Semua anggota Direksi PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) tidak ada yang memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya.

Berikut ini adalah daftar orang tua anggota Direksi :

NO	NAMA	JABATAN	NAMA AYAH	NAMA IBU	ALAMAT
1	SUCIPTO, SE	DIREKTUR UTAMA	ATMOREJONO	PONIYEM	KETRO RT 001 RW 004

					GUWOTIRTO GIRIWOYO WONOGIRI
2	SARTI, SE.MM	DIREKTUR UMUM DAN KEPATUHAN	KARDI PARTOSUWITO	MANIYEM	JATIBEDUG RT 005 RW 007 PURWOREJO WONOGIRI
3	SUWARTO, SE	DIREKTUR PEMASARAN	SUKATMO	KARTI	CINDEREJO RT 002 RW 002 JATISARI JATISRONO WONOGIRI

#### 4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Sebagaimana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris juga tidak ada yang memiliki saham di PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda), BPR lain maupun Perusahaan lainnya. Anggota Dewan Komisaris terdiri dari wakil pemegang saham dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

#### 5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan atau Pemegang Saham

Semua anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan atau Pemegang Saham.

Berikut ini adalah daftar orang tua anggota Dewan Komisaris :

NO	NAMA	JABATAN	NAMA AYAH	NAMA IBU	ALAMAT
1	AGUS PRASUTIO, SH.M.Si	KETUA DEWAN KOMISARIS	R. TIKNO HARTONO	KOENDARI	GRAHA WAHID PARIS BLOK B/3B SAMBIROTO RT 002 RW 010 TEMBALANG SEMARANG
2	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos.M.Si	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	HADI SUTARMO	ENDANG KUPARMI	PENCIL RT 003 RW 003 WURYOREJO WONOGIRI



**6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS**

Sebagai Perusahaan Daerah, ketetapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta mengacu Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2019.

Berikut ini adalah daftar remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2019:

- Berupa Uang Tunai

Jenis Remunerasi	Direksi			Dewan Komisaris	
	Sucipto, SE	Suwarto, SE	Sarti, SE. MM	Agus Prasutio, SH. M.Si	Edhy Tri Hadyantho, S.Sos. M.Si
1. Gaji/Honor	336.520.800	269.216.640	269.216.640	134.608.320	107.686.656
2. THR	48.074.400	38.459.520	38.459.520	19.229.760	15.383.808
3. TPP	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-
4. Tantiem	102.340.189	81.872.151	81.872.151	40.936.075	8.187.215
5. Remunerasi Lainnya	36.055.800	28.844.640	28.844.640	14.422.320	11.537.856
<b>Jumlah penerimaan keseluruhan</b>	<b>528.991.189</b>	<b>424.392.951</b>	<b>424.392.951</b>	<b>209.196.475</b>	<b>142.795.535</b>

- Berupa fasilitas lain

Jenis Remunerasi	Direksi			Dewan Komisaris	
	Sucipto, SE	Suwarto, SE	Sarti, SE. MM	Agus Prasutio, SH. M.Si	Edhy Tri Hadyantho, S.Sos. M.Si
1. Perumahan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada
2. Transportasi	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas	Tidak ada	Tidak Ada
3. Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS	BPJS	Tidak ada	Tidak Ada
4. Telp Cell	Android	Android	Android	Android	Tidak Ada

**7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Kebijakan mengenai sistem penggajian pegawai PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) juga mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2019. Daftar gaji pegawai dan pengurus tertinggi dan terendah beserta ratio gaji tertinggi dan terendah tahun 2019 sebagaimana daftar berikut ini:

No	Uraian	Gaji tertinggi (Rp)	Gaji terendah (Rp)	Rasio
1	Dewan Komisaris	9.614.880	7.691.904	55,56% : 44,44%
2	Direksi	24.037.200	19.229.760	55,56% : 44,44%
3	Pegawai	11.352.280	1.797.000	86,33% : 13,67%
4	Direksi dan Dekom	24.037.200	7.691.904	75,76% : 24,24%
5	Direksi dan Pegawai	24.037.200	1.797.000	93,04% : 6,96%

## 8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### a. Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Dalam 1 (satu) Tahun

Selama tahun 2019, Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali. Sebagian besar rapat diselenggarakan di Ruang Direktur Utama dan dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris dan semua Anggota Direksi. Hasil rapat dituangkan dalam Notulen Rapat yang diarsipkan di Ruang Kerja Dewan Komisaris PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda).

### b. Jumlah Rapat yang Dihadiri secara Fisik dan atau melalui Teknologi Telekonferensi

Setiap rapat Dewan Komisaris dan Direksi dihadiri secara fisik. Sampai dengan saat ini belum pernah dilaksanakan rapat melalui media Teknologi Telekonferensi.

### c. Kehadiran masing-masing anggota setiap rapat

Semua rapat yang telah terselenggara selama tahun 2019 selalu dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dan semua anggota Direksi.

### d. Topik atau Materi Rapat

Dari 11 (sebelas) kali rapat yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi dapat di ringkas hasil rapat sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi Rapat
1	08 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2019 adalah tahun kompetisi dimana MEA tahun 2020 sudah masuk perbankan, dengan demikian BPR harus menata diri dan tidak berpangku tangan di zona yang nyaman dan tidak terlena. BPR harus lebih fokus dan memperjelas peta wilayah kerja dengan pangsa pasar yang masih besar, jangan sampai wilayah kerja kita lepas.</li> <li>Teknologi Informasi harus mempunyai pusat data yang akurat dan valid serta terus berkembang mengikuti era globalisasi.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPR wajib meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntable.</li> <li>• SDM yang dimiliki harus ramah, profesional, loyal, efisien, inovatif, berdedikasi dan berintegritas. Untuk pejabat eksekutif mulai tahun 2019 wajib mengisi LHKPN.</li> <li>• Tahun 2019 BPR berencana meluncurkan Tabungan “SIMPEL AYAH SUKSES” yang akan di launching bersama dengan pengukuhan TPAKD oleh Bapak Bupati Wonogiri.</li> </ul>
2	08 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk tabungan “SIMPEL AYAH SUKSES” telah mendapat dukungan Bupati Wonogiri, pada tanggal 19 Februari 2019 akan dilakukan launching bersamaan dengan pengukuhan TPKAD.</li> <li>• Mutasi pegawai bertujuan memberikan penyegaran, pengawasan dan perbaikan budaya kerja.</li> <li>• Dalam operasional selalu memperhatikan Tertib Administrasi, Tertib Keuangan, Tertib Fisik.</li> <li>• Menjalani Komunikasi dan Koordinasi dalam memperhatikan keberadaan pasar-pasar tradisional dan pembangunan sektor ekonomi daerah.</li> <li>• SOP selalu mengikuti regulasi disesuaikan dengan ketentuan. Mencermati kredit macet dan DPK yang terbengkalai.</li> </ul>
3	05 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perubahan budaya kerja dibanding dengan tahun lalu yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.</li> <li>• Antisipasi kondisi likuiditas menjelang puasa dan lebaran dan hindari Linkage program dalam pemenuhan likuiditas.</li> <li>• Mengajukan RUPS dalam pengadaan pegawai dengan dilampiri analisa kebutuhan pegawai.</li> <li>• Menyetujui pensiun Sdr. Suparmo, SE karena diangkat sebagai Direksi di BPR lain.</li> </ul>
4	29 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2018 dan Notulen RUPS-LB tanggal 14 Maret 2019 agar memproses Pemberhentian Status Pegawai Sdr. Didik Darmadi sebagai pegawai dikarenakan diangkat sebagai Direksi di BPR lain dan diberikan haknya sebagaimana ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Mengagendakan penyerahan Surat Keputusan tersebut bersama-sama dengan penyerahan surat Pensiun Sdr. Suparmo, Surat Keputusan Pemberhentian Status Pegawai Sdr. Suwanto dan Sdr. Sarti yang menjabat sebagai Direksi.</li> </ul>
5	16 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian kredit agar lebih ditingkatkan pemantauannya, sehingga pertumbuhan</li> </ul>

		<p>kredit secara kualitas juga diikuti dengan kualitas kredit yang terus membaik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalinkan kerjasama dengan ASKRINDO dengan harapan untuk mitigasi risiko kredit dapat terjamin.</li> <li>• Untuk pegawai Sdr. Bambang Santoso yang mengajukan pensiun dini sebelum disetujui agar dilakukan cek ulang keseluruhan tugas dan tanggungjawabnya yang meliputi nasabah di area tugasnya, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.</li> </ul>
6	18 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk BPR yang mendukung program pemerintah dapat berkembang dengan baik diantaranya, KMB, Kredit Mentari dan Tabungan Simpel Ayah Sukses.</li> <li>• Segera dilaksanakan pengadaan pegawai untuk mengganti SDM yang pensiun dan cabang yang pertumbuhannya pesat.</li> <li>• Proses menuju PT untuk segera dilaksanakan dan harus berbenah diri.</li> <li>• Menyetujui pembangunan Ruang Data Center TI.</li> <li>• Persetujuan pelaksanaan rekreasi dan pemberian gaji ke 13</li> </ul>
7	09 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi harus aktif memberikan motivasi, pembinaan dan pengarahan kepada seluruh pegawai. Sehingga ada peningkatan kualitas pegawai yang didukung dengan memanfaatkan biaya pendidikan secara efektif dan efisien.</li> <li>• Pengalihan kepala kantor kas yang kurang produktif untuk pengisian kasubbid kepatuhan dan kasi pelayanan.</li> <li>• Evaluasi dan pembenahan struktur organisasi.</li> </ul>
8	16 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit Non Lancar meningkat turunnya NPL karena ekspansi kredit, maka harus memetakan penyelesaian kredit non lancar dengan lebih efektif dan terus memegang prinsip kehati-hatian dalam ekspansi kredit.</li> </ul>
9	06 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan persaingan yang sehat sesama BPR milik Pemerintah Daerah</li> <li>• Pengembangan Staf TI dan Staf Legal melalui berbagai pelatihan untuk mempersiapkan perubahan Badan Hukum menjadi PT.</li> <li>• Perlunya peningkatan etos kerja dan budaya kerja yang baik melalui pelatihan.</li> </ul>
10	20 Nopember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Tahun 2019 tinggal 2 (dua) bulan untuk bisa di optimalkan dengan menjaga kualitas kredit dan pengawasan yang ketat.</li> <li>• Pemutusan Kerja Sdr. Mohamad Hasyim karena mengundurkan diri mengikuti seleksi Direksi di BPR lain untuk di proses sesuai dengan ketentuan SOP SDM.</li> </ul>

11	10 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyesuaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan beralihnya Badan Hukum dari PD ke PT berpedoman pada ketentuan.</li> <li>• Pertumbuhan RBB agar rasional dalam proses finishing melihat hasil akhir tahun 2019</li> <li>• Konsep rekrutmen SDM agar diteruskan dan mengoptimalkan kinerja Capeg, selain itu penggunaan biaya pendidikan lebih optimal untuk meningkatkan kualitas SDM.</li> <li>• Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta SKAI lebih dioptimalkan lagi dalam mitigasi risiko-risiko yang akan terjadi.</li> </ul>
----	------------------	--

**9. Jumlah Penyimpangan Intern (*internal fraud*)**

**a. Jumlah *Internal Fraud* yang telah diselesaikan**

Tahun 2019 tidak ada kasus fraud.

**b. Jumlah *Internal Fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian internal BPR**

Tahun 2019 tidak ada kasus fraud yang masih dalam proses penyelesaian Internal BPR.

**c. Jumlah *Internal Fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya.**

Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya di tahun 2019.

**d. Jumlah *Internal Fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum**

Tahun 2019, tidak ada kasus fraud yang ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Daftar *Internal Fraud* yang terjadi di PT BPR BKK WONOGIRI (Perserada) tahun 2018 dan 2019 secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut ini :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 Kasus	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil	1 Kasus	Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

**10. Permasalahan Hukum**

**a. Jumlah Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)**

Tahun 2019 terdapat 2 (dua) kasus permasalahan hukum Perdata yang dihadapi yang telah selesai dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

**b. Jumlah Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.**

Terdapat 1 (satu) kasus hukum perdata yang dihadapi dan sampai dengan akhir tahun 2019 belum dapat terselesaikan yaitu kasus hukum debitur Kantor Pusat Operasional No Rekening 01.01.01.002747. Sampai dengan laporan ini disajikan kasus tersebut dalam tahap Relas Panggilan perkara Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor putusan 284/Pdt/2019/PT SMG tanggal 18 Juli 2019 dimana dalam putusan tersebut menyatakan pemohon banding telah melakukan wan prestasi dan mempertimbangkan putusan PN Wonogiri yang menghukum penggugat untuk melaksanakan jual lelang atas obyek sengketa tanah sehingga perintah eksekusi lelang dari PN Wonogiri dibatalkan.

Adapun permasalahan hukum yang dihadapi PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) di tahun 2019 sebagaimana tabel berikut ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2 kasus	Nihil
Dalam proses penyelesaian	1 Kasus	Nihil
Total	3 kasus	Nihil

**11. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan**

Selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana rincian pada tabel berikut ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## 12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) adalah wujud kepedulian PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) terhadap lingkungan sosial. Selama tahun 2019 ada beberapa kegiatan yang bertujuan sosial yang telah dilaksanakan yaitu :

No	Kriteria Masalah Sosial Yang Ditangani	Jenis Kegiatan CSR /Kegiatan Sosial	Lokasi Kegiatan CSR/Kegiatan Sosial	Mitra Kerja CSR/Kegiatan Sosial	Target Sasaran	Jumlah Sasaran Yang Ditangani	Nilai Dana CSR/Kegiatan Sosial Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Kemiskinan	Pembukaan "SIMPEL AYAH"	Kabupaten Wonogiri	Donatur	Kemiskinan	114 Orang	63.300.000
2	Kemiskinan	Bantuan Anak Yatim/Piatu & Kaum Dhuafa	Kabupaten Wonogiri	Panti Asuhan	Kemiskinan		23.774.026
3	Kesehatan	Bantuan HIV/AIDS DKK	Kabupaten Wonogiri		Kesehatan		1.073.700
4	Kemiskinan	Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kabupaten Wonogiri		Kemiskinan		139.861.000
5	Fasilitas Umum	Bantuan Untuk Pembangunan Masjid	Kabupaten Wonogiri		Peningkatan Fasilitas Umum		4.936.000
6	Keterpencilan	Bantuan Air Bersih	Kabupaten Wonogiri		Keterpencilan		7.500.000
7	Disabilitas	Bantuan Kaum Difable & Yayasan Penderita Cacat	Kabupaten Wonogiri dan Sekitarnya		Disabilitas		500.000
8	Lain Lain	Bantuan Sosial Lainnya	Kabupaten Wonogiri dan Sekitarnya		Lain-lain		57.050.500
<b>Jumlah</b>							<b>297.995.226</b>

## PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik oleh Pemilik maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Wonogiri, 24 April 2020

Menyetujui,  
Dewan Komisaris

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)



**AGUS PRASUTIO, SH,M.Si**  
Ketua

PT BPR BKK WONOGIRI Perseroda)



**SUCIPTO, SE**  
Direktur Utama